



2023

AUDIT REPORT

PT JAMKRIDA JABAR

Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

terdaftar dan diawasi oleh:



PT JAMKRIDA JABAR

LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2023

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen



**Surat Pernyataan Direksi
Tentang Tanggung Jawab
Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023
PT Jamkrida Jabar**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Agus Subrata
Alamat kantor : Jalan Soekarno-Hatta No. 592 Buah batu Bandung, Jawa Barat 40286
Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Jamkrida Jabar ("Perusahaan") pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk periode 12 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut;
2. Laporan keuangan PT Jamkrida Jabar telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan;
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Jamkrida Jabar telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan PT Jamkrida Jabar tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
3. Saya bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Jamkrida Jabar.
4. Sebelumnya kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00129/2.1000/AU.1/08/1290-4/1/IV/2024 bertanggal 5 April 2024 atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023 dengan opini wajar tanpa modifikasi. Laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali pada tanggal 29 April 2024 sebagaimana diungkapkan pada catatan 31 atas laporan keuangan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandung, 29 April 2024

Direktur Keuangan

Agus Subrata

**PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

	Halaman
Daftar Isi	
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1 - 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3 - 4
Laporan Perubahan Ekuitas	5 - 6
Laporan Arus Kas	7
Catatan Atas Laporan Keuangan	8 - 45

No. 00146/2.1000/AU.1/08/1290-4/1/IV/2024

Laporan Auditor Independen

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Jamkrida Jabar**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jamkrida Jabar ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jamkrida Jabar pada tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan pada laporan kami.

Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00129/2.1000/AU.1/08/1290-4/1/IV/2024 tanggal 5 April 2024 dengan opini wajar tanpa modifikasi atas laporan keuangan PT Jamkrida Jabar tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Selanjutnya, PT Jamkrida Jabar telah menerbitkan Kembali laporan keuangannya untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan sebagaimana diungkapkan dalam catatan 31 atas laporan keuangan. Oleh karena itu, kami memberikan Laporan Auditor Independen ini atas laporan keuangan yang telah diterbitkan Kembali.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

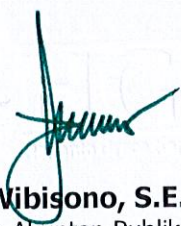
Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (Lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan Perusahaan atau aktivitas bisnis dalam Perusahaan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN



Aryo Wibisono, S.E.,CPA.
Register Akuntan Publik No. 1290
Jakarta, 29 April 2024



PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	4	228,216,186,996	191,272,939,970
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian		(539,940,790)	(878,876,521)
Surat Berharga	2d, 3a,	148,439,700,262	104,755,202,100
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	3b, 9	-	(20,857,963)
Piutang Re/Cogaransi	2e, 5	134,870,098,529	83,488,976,172
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian *)		(5,668,419,657)	(5,226,122,382)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	2d, 2j, 6	22,145,008,231	10,024,534,884
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian		(213,564,612)	(213,564,612)
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	2f, 8a	30,791,300,342	24,040,498,999
Piutang Lain-lain	7	223,791,924	672,904,055
Properti Investasi	10	2,626,966,820	2,495,100,000
Jumlah Aset Lancar		560,891,128,045	410,410,734,702
Aset Tidak Lancar			
Beban Dibayar Dimuka	2f, 8b	99,244,910,341	75,614,738,918
Aset Tetap - Bersih	2g, 3b, 11	12,694,101,439	13,361,215,515
Aset Pajak Tangguhan *)	2o, 20d	3,642,069,959	5,840,943,395
Aset Lain-Lain	2i, 2k, 12	1,218,008,076	272,278,302
Jumlah Aset Tidak Lancar		116,799,089,815	95,089,176,130
JUMLAH ASET		677,690,217,860	505,499,910,832

*) Diterbitkan kembali (Catatan 31)

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Pajak *)	2o, 20a	3,832,869,855	1,251,733,981
Utang Re/Cogaransi	13	96,310,581,851	38,197,826,176
Beban yang Masih Harus Dibayar	14	4,763,233,569	4,158,532,265
Penampungan Sementara	15	24,573,600,342	17,652,888,693
Utang Lancar Lainnya	16	12,499,979	33,244,767
Pendapatan Diterima Dimuka	17a	75,910,274,920	43,996,687,948
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		205,403,060,516	105,290,913,830
Liabilitas Jangka Panjang			
Pendapatan Diterima Dimuka	17b	130,228,896,506	121,573,407,802
Cadangan Klaim	2r, 18	19,265,173,914	15,062,088,847
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2n, 19	2,422,327,831	1,975,738,918
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		151,916,398,251	138,611,235,567
JUMLAH LIABILITAS		357,319,458,767	243,902,149,397
EKUITAS			
Modal			
Modal dasar sebesar dari 30.000 lembar saham, modal ditempatkan dan disetor penuh per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebanyak 26.028 dan 20.320 lembar saham dengan nilai nominal Rp 10.000.000 per lembar saham.			
	21	260,280,000,000	203,200,000,000
Cadangan Umum	21	50,195,706,826	44,817,709,373
Saldo Laba *)	21	10,155,229,276	15,202,050,435
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga			
Keuntungan pengukuran kembali	2d, 3a, 3b, 8	22,848,546	(1,340,127,293)
Selisih Pengukuran Kembali			
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	2n, 19	(283,025,555)	(281,871,080)
JUMLAH EKUITAS		320,370,759,093	261,597,761,435
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		677,690,217,860	505,499,910,832

*) Diterbitkan kembali (Catatan 31)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
PENDAPATAN PENJAMINAN			
Imbal Jasa			
Penjaminan / Kafalah	2p, 22	236,550,793,972	166,944,974,562
Beban Akuisisi	2p, 22	(35,601,464,854)	(24,228,085,654)
Restitusi IJP	2p, 22	(5,621,008,681)	(4,527,790,716)
Manajemen Fee	2p, 22	27,629,983,137	19,458,760,127
Beban Regaransi	2p, 22	(108,944,082,531)	(73,770,797,298)
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN		114,014,221,043	83,877,061,021
BEBAN KLAIM			
Beban Klaim	2t, 24	(82,747,342,207)	(51,328,319,347)
Pemulihan (Pembentukan) Cadangan Klaim	2t, 24	(2,366,662,130)	625,615,439
JUMLAH BEBAN KLAIM		(85,114,004,337)	(50,702,703,908)
PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH		28,900,216,706	33,174,357,113
PENDAPATAN INVESTASI	2d, 2j, 23	18,302,697,376	13,279,739,311
PENDAPATAN SUBROGASI	2r, 26	2,519,757,010	1,924,565,589
PENDAPATAN (BEBAN) LAINNYA *)	27	(2,008,009,143)	1,584,177,254
BEBAN USAHA			
Beban Operasional	25	(6,143,007,020)	(3,936,842,775)
Beban Sumber Daya Manusia	25	(21,445,494,559)	(18,966,640,491)
Beban Administrasi dan Umum	25	(6,870,798,074)	(6,574,672,623)
JUMLAH BEBAN USAHA		(34,459,299,653)	(29,478,155,889)
LABA SEBELUM PAJAK *)		13,255,362,296	20,484,683,378
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Beban Pajak Kini *)	2o, 21b	(1,282,950,680)	-
Manfaat Pajak Tangguhan *)	2o, 21d	(1,817,182,340)	(5,282,632,943)
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(3,100,133,020)	(5,282,632,943)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN *)		10,155,229,276	15,202,050,435

*) Diterbitkan kembali (Catatan 31)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
PENGHASILAN KOMPREHENSIF			
LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI			
Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Kerja		(1,480,096)	(292,634,239)
Pajak Tangguhan Terkait Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Kerja		325,621	108,161,373
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI			
Keuntungan (Kerugian) Aset Keuangan yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif		1,744,992,557	(1,251,542,797)
Pajak Tangguhan Terkait Keuntungan (Kerugian) Aset Keuangan yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif		(382,016,717)	480,629,827
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1,361,821,365	(955,385,836)
LABA KOMPREHENSIF		11,517,050,641	14,246,664,599

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Disetor	Cadangan Umum	Selisih Nilai Wajar Obligasi setelah pajak tanggungan	Keuntungan (kerugian) imbalan pasti setelah pajak tanggungan	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Saldo per 31 Desember 2021		153,200,000,000	40,139,066,131	(569,214,323)	(97,398,214)	10,585,165,700	203,257,619,294
Modal Disetor	21	50,000,000,000	-	-	-	-	50,000,000,000
Cadangan Umum	21	-	4,678,643,242	-	-	(4,678,643,242)	-
Pembagian Dividen	21	-	-	-	-	(3,059,112,887)	(3,059,112,887)
Bonus dan Tantiem	21	-	-	-	-	(2,318,151,286)	(2,318,151,286)
CSR	21	-	-	-	-	(529,258,285)	(529,258,285)
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	-	15,202,050,435	15,202,050,435
Selisih Nilai Wajar Obligasi	2d, 3a, 3b, 8	-	-	(770,912,970)	-	-	(770,912,970)
Penghasilan komprehensif lain imbalan kerja setelah aset pajak tanggungan	2n, 19	-	-	-	(184,472,866)	-	(184,472,866)
Saldo per 31 Desember 2022		203,200,000,000	44,817,709,373	(1,340,127,293)	(281,871,080)	15,202,050,435	261,597,761,435

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Disetor	Cadangan Umum	Selisih Nilai Wajar Obligasi setelah pajak tanggunghan	Keuntungan (kerugian) imbalan pasti setelah pajak tanggunghan	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Saldo per 31 Desember 2022		203,200,000,000	44,817,709,373	(1,340,127,293)	(281,871,080)	15,202,050,435	261,597,761,435
Modal Disetor	21	57,080,000,000	-	-	-	-	57,080,000,000
Cadangan Umum	21	-	5,377,997,453	-	-	(5,377,997,453)	-
Pembagian Dividen	21	-	-	-	-	(4,803,847,938)	(4,803,847,938)
Bonus dan Tantiem	21	-	-	-	-	(3,500,000,000)	(3,500,000,000)
CSR	21	-	-	-	-	(1,520,205,044)	(1,520,205,044)
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	-	10,155,229,276	10,155,229,276
Selisih Nilai Wajar Obligasi	2d, 3a, 3b, 8	-	-	1,362,975,840	-	-	1,362,975,840
Penghasilan komprehensif lain imbalan kerja setelah aset pajak tanggunghan	2n, 19	-	-	-	(1,154,475)	-	(1,154,475)
Saldo per 31 Desember 2023		260,280,000,000	50,195,706,826	22,848,546	(283,025,555)	10,155,229,276	320,370,759,093

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari Penjaminan		252,098,067,208	203,239,717,653
Pembayaran Klaim		(82,747,342,207)	(54,548,979,790)
Pembayaran kepada Karyawan dan Pihak Ketiga		(154,548,031,841)	(141,826,351,637)
Pembayaran Pajak		1,298,185,194	160,712,833
Pendapatan Subrogasi		2,519,757,010	1,924,565,589
Utang Lancar Lainnya		(20,744,788)	33,000,023
Pendapatan lain-lain		(1,925,505,566)	(2,696,977,905)
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI			
(DIGUNAKAN UNTUK)			
AKTIVITAS OPERASI		16,674,385,010	6,285,686,766
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS INVESTASI			
Penempatan Aset Keuangan		(41,939,505,605)	(27,075,457,086)
Penerimaan Investasi		16,659,133,968	12,815,205,648
Properti Investasi		(131,866,820)	-
Pengeluaran Untuk			
Pengadaan Aset Tetap		(331,246,780)	(1,011,639,275)
Penerimaan atas Penjualan Aset Tetap		-	-
Pelepasan (Pengadaan) Aset Lain lain		(1,243,599,765)	(42,667,452)
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK			
AKTIVITAS INVESTASI		(26,987,085,002)	(15,314,558,165)
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS PENDANAAN			
Tambahan Modal Disetor		57,080,000,000	50,000,000,000
Pembagian Dividen		(4,803,847,938)	(3,059,112,887)
Pembagian Bonus dan Tantiem		(3,500,000,000)	(2,318,151,286)
CSR		(1,520,205,044)	(529,258,285)
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK)			
AKTIVITAS PENDANAAN		47,255,947,018	44,093,477,542
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH			
KAS DAN SETARA KAS		36,943,247,026	35,064,606,143
KAS DAN SETARA KAS			
AWAL TAHUN		191,272,939,970	156,208,333,827
KAS DAN SETARA KAS			
AKHIR TAHUN		228,216,186,996	191,272,939,970
Kas dan Setara Kas terdiri atas :			
Kas		12,939,812	117,532,482
Giro Bank		21,512,508,266	14,968,904,855
Deposito		206,690,738,918	176,186,502,633
Jumlah Kas dan Setara Kas		228,216,186,996	191,272,939,970

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan informasi umum

PT Jamkrida Jabar, selanjutnya disebut "Perusahaan", dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2011, dan telah diaktakan berdasarkan akta No. 03 tanggal 03 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Yuliani Idawati, S.H.Sp.N. Notaris di Kota Bandung. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-56159.AH.01.01 tahun 2012.

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan Perusahaan dapat membuka cabang sebagaimana telah ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan dewan komisaris.

Perusahaan mempunyai Unit Usaha Syariah pada tahun 2015. Unit Usaha Syariah dibentuk oleh Keputusan Direksi PT Jamkrida Jabar Nomor: Kep-0008/DIR/JJ/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Panitia Pembentukan Unit Syariah dan telah mendapat izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan Nomor: SR-5/NB.223/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah PT.Jamkrida Jabar.

Perusahaan dalam menjalankan usahanya telah memperoleh izin-izin sebagai berikut:

- 1) Salinan Keputusan Dewan Komisiner No. Kep.05/D.05/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jamkrida Jabar.
- 2) Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 503/014/DP-SKJ/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 dari Pemerintah Kota Bandung.
- 3) Nomor Izin Berusaha (NIB) 9120304971535 yang di tetapkan pada tanggal 13 September 2019.
- 4) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No. 101114618463 tanggal 12 September 2018 dari Pemerintah Kota Bandung.
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 31.625.184.2-422.000 dari Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia.

b. Usaha

Perusahaan bergerak dalam bidang penjamin pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perusahaan dapat melaksanakan:

- Penjaminan kredit untuk penguatan modal bagi koperasi dan UMKM.
- Penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi pada anggotanya.
- Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia.
- Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan BUMN dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- Penjaminan surat utang.
- Penjaminan transaksi dagang.
- Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*).
- Penjaminan bank garansi.
- Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri.
- Penjaminan *letter of credit*.
- Penjaminan kepabeanaan.
- Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan.
- Penyediaan informasi terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan.
- Penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (LANJUTAN)

b. Usaha (Lanjutan)

Kafalah Pembiayaan Syariah adalah suatu kegiatan pelengkap bagi suatu pembiayaan dengan pola syariah, dengan demikian harus terdapat akad/perjanjian pembiayaan antara Terjamin (Makfuul 'Anhu) dan Penerima Jaminan (Makfuul Lahu). Namun demikian karena Kafalah Pembiayaan berfungsi sebagai substitusi agunan maka PT Jamkrida Jabar melalui penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Kafalah dapat menjadi dasar ditandatanganinya suatu perjanjian pembiayaan. Seluruh kegiatan Kafalah Pembiayaan mengacu pada fatwa DSN-MUI.

c. Tempat Usaha

Perusahaan beroperasi di Jalan Soekarno-Hatta No. 592 Buah Batu Bandung, Jawa Barat 40286. Tujuan pendirian PPKD (Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah) untuk meningkatkan penyaluran kredit produktif dan peningkatan LDR dari BPR, Bank Umum dan BPR yang terdapat di wilayah PPKD.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kegiatan perekonomian daerah. Dari sisi sosial lingkungan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

d. Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Pemegang Umum Saham Luar Biasa (RUPS-LB) No.02 pada tanggal 10 Oktober 2023, susunan pengurus PT Jamkrida Jabar pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai

		2023	2022
Direksi			
Direktur Utama	:	-	Yanti Rachmawati
Direktur Keuangan	:	Agus Subrata	Yanti Rachmawati *
Direktur Operasional	:	Taufiek Dharviandi	Agus Subrata
Dewan Komisaris			
Komisaris Utama	:	Muhammad Taufiq Budi Santoso	Muhammad Taufiq Budi Santoso
Komisaris Independen	:	-	Dini Rosdini
Dewan Pengawas Syariah			
Ketua	:	Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA	Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA
Anggota	:	Khozin Abu Faqih, Lc.	Khozin Abu Faqih, Lc.

* Pada tahun 2022 Ny. Yanti Rachmawati menjabat sebagai Direktur Utama merangkap sebagai Plt. Direktur Keuangan

Sesuai Akta Penyertaan Keputusan Para pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham No.02 Tanggal 10 Oktober 2023 menyetujui pengunduran diri Ny. Yanti Rachmawati selaku Direktur Utama periode 2022-2027 dan Plt. Direktur Keuangan Perusahaan.

Setelah mundurnya Ny. Yanti Rachmawati sebagai Direktur Utama, Perusahaan belum menetapkan pengganti sehingga posisi Direktur Utama tidak ada yang menempati.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Jamkrida Jabar Nomor 38 tanggal 28 November 2014 dan Surat Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) Nomor : U-388/DSN-MUI/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang merekomendasikan dan menetapkan Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA sebagai Ketua dan Khozin Abu Faqih, Lc sebagai Wakil Ketua.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (LANJUTAN)

d. Susunan Pengurus (Lanjutan)

Taufiek Dharviandi baru efektif menjabat sebagai Direktur Operasional pada Februari 2024 setelah melakukan fit and proper test dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu Ny. Dini Rosdini selesai masa jabatan sebagai Komisaris Independen pada November 2023.

Sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 39 tanggal 26 November 2019, Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan untuk mengangkat serta menetapkan Ny. Dini Rosdini sebagai Komisaris Independen untuk periode 2019-2023.

Sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 74 tanggal 13 September 2021, Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan untuk mengangkat Tuan Agus Subrata Direktur Operasional untuk periode 2021-2026.

Sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 06 tanggal 29 November 2021, Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan untuk mengangkat Muhammad Taufiq Budi Santoso sebagai Komisaris Utama untuk periode 2021-2026.

Sesuai Akta Penyertaan Keputusan Para pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham No.11 Tanggal 05 April 2022 memutuskan dan menyetujui Ny. Yanti Rachmawati selaku Direktur Utama periode 2022-2027

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang diterapkan oleh Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia. Standar Akuntansi yang diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan PT Jamkrida Jabar disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan disusun berdasarkan azas akrual dengan menggunakan konsep nilai perolehan, kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur dengan dasar sebagaimana dijelaskan di dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung, yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

b. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, manajemen Perusahaan menggunakan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi, jumlah aset dan liabilitas serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Pada tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut. Penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan telah dibuat berdasarkan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi. Penerapan PSAK baru yang signifikan adalah PSAK 71 "Instrumen Keuangan", PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". Dampak dari penerapan PSAK baru tersebut dijelaskan di bawah ini.

PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

PSAK 71 menggantikan ketentuan PSAK 55 yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penghentian pengakuan instrumen keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Perusahaan menerapkan model baru kerugian ekspektasian dengan perkiraan masa depan, menggunakan pendekatan yang disederhanakan untuk piutang usaha dan pendekatan umum untuk aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan lainnya.

Sesuai ketentuan transisi PSAK 71, Perusahaan telah memilih untuk tidak menyajikan kembali periode komparatif. Dampak kumulatif dari penerapan PSAK 71 pada tanggal 31 Desember 2019 akan diakui oleh Perusahaan sebagai penyesuaian saldo laba per 1 Januari 2020.

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2023:

- Amandemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan"
- Penyesuaian PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan, Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan."
- Amandemen PSAK 16: "Aset tetap"
- Amandemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan"

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

(i) Klasifikasi

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(i) Klasifikasi (Lanjutan)

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Perusahaan dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penerapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "*accounting mismatch*").

Penilaian Model Bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Perusahaan;
- Apakah risiko yang mempengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual diperoleh).

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga marjin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan:

- Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain. Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(ii) Pengakuan awal

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Perusahaan, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

- a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:
 - Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - Perusahaan telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Perusahaan yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Perusahaan dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (Lanjutan)

- b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing masing diakui dalam laporan laba rugi.

(v) Reklasifikasi aset keuangan

Perusahaan mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada wajar.

(vi) Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(vii) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

(viii) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

(ix) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

- Perusahaan mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.
- Perusahaan mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.
- Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan.
- Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Perusahaan menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian

Kerugian kredit ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang pada Perusahaan sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Perusahaan).
- aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan. Kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi.
- kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(ix) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (Lanjutan)

Aset keuangan yang memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan.
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.
- pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Aset keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or originated credit impaired financial assets - POCI*)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

Penyajian penyisihan kerugian kredit ekspektasian dalam laporan posisi keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- instrumen utang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan

e. Piutang Regaransi

Pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra *co-guarantee* dan mitra *re-guarantee* dicatat sebagai piutang re/cogaransi.

Pengakuan piutang re/cogaransi dilakukan setiap terjadi pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra *co-guarantee* dan mitra *re-guarante*.

Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai piutang *co-guarantee* pada saat mitra *co-guarantee* mengaksep atau mengakui piutang dalam penyelesaian tersebut sebagai utangnya (sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama antara Perusahaan dengan mitra *co-guarantee*), namun pembayaran belum dilakukan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

f. Beban Dibayar Dimuka

Beban dialokasikan sesuai dengan masa manfaat tiap-tiap biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Beban *co-guarantee*, beban *re-guarantee*, beban akuisisi dibayar di muka diamortisasi secara proporsional mengikuti pola pengakuan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan/ Kafalah.

g. Aset Tetap

Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap". Revisi PSAK No. 16 ini mengatur akuntansi tanah dan mencabut PSAK No. 47, "Akuntansi Tanah". Penerapan SAK revisi ini tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada). Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi rutin yang signifikan dilakukan, yang merupakan suatu kondisi untuk menentukan kelangsungan operasional suatu jenis aset tetap, biaya atas masing-masing inspeksi signifikan tersebut diakui ke dalam jumlah tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus, berdasarkan taksiran masa manfaat laporan, sebagai berikut:

Bangunan Gedung	Masa Manfaat (tahun)
Bangunan Gedung	20-30
Instalasi	15
Inventaris Kantor	2-10
Kendaraan Bermotor	5

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Biaya pinjaman, termasuk rugi selisih kurs, yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.

Tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa besar kemungkinan hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Selanjutnya PSAK No. 48, "Penurunan Nilai Aset", mengharuskan nilai aset dikaji ulang atas kemungkinan penurunan pada nilai wajarnya yang disebabkan oleh peristiwa atau perubahan keadaan yang menyebabkan nilai tercatat aset mungkin tidak dapat dipulihkan.

Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh entitas saat ini atau merupakan taksiran nilai atau potensi arus kas masuk apabila aset tersebut dijual pada saat penarikan/penghentian (*retirement*) aset.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direview, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

h. Aset Tidak Berwujud

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi. Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan rivi periodik aset tetap untuk memastikan sisa masa manfaat, nilai residu, dan metode penyusutan masih sesuai dengan estimasi sebelumnya.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan penelaahan untuk memutuskan apakah terdapat indikasi penurunan nilai.

Aset tidak berwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tak berwujud terdiri dari harga beli, termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi, setelah dikurangi diskon dan rabat dan semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset tidak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Perusahaan menilai apakah umur manfaat aset tidak berwujud terbatas atau tidak terbatas dan, jika terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama umur manfaat. Aset tidak berwujud dianggap oleh Perusahaan memiliki umur manfaat tidak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode aset diperkirakan menghasilkan arus kas neto untuk entitas.

Jumlah tersusutkan aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya. Amortisasi dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yakni ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan cara yang dimaksudkan oleh manajemen. Amortisasi dihentikan pada tanggal yang lebih awal antara ketika aset tersebut dikelompokkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual (atau dimasukkan dalam kelompok aset lepasan yang diklasifikasikan dalam aset yang dimiliki untuk dijual. Metode amortisasi yang digunakan menggambarkan perkiraan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomi masa depan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka digunakan metode garis lurus.

1. Lisensi

Lisensi disajikan berdasarkan harga perolehan lisensi memiliki masa manfaat yang terbatas dan disajikan berdasarkan harga perolehan diikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan bertujuan untuk mengalokasikan harga perolehan lisensi selama estimasi masa manfaatnya (3-5 tahun).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

h. Aset Tidak Berwujud (Lanjutan)

2. Piranti Lunak Komputer

Lisensi piranti lunak komputer yang diperoleh dikapitalisasi sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan membuat piranti lunak tersebut siap untuk digunakan. Biaya ini diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya (4 tahun). Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan bertujuan untuk mengalokasikan harga perolehan lisensi selama estimasi masa manfaatnya (4 tahun).

Biaya yang berhubungan dengan pengembangan atau pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya-biaya yang terkait langsung dengan produksi piranti lunak yang unik dan dapat diidentifikasi serta dikendalikan oleh Perusahaan dan kemungkinan besar akan memberikan manfaat ekonomi yang melebihi biayanya dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai aset tak berwujud. Biaya-biaya langsung ini meliputi, antara lain, biaya karyawan yang turut mengembangkan piranti lunak dan porsi biaya overhead yang terkait.

Biaya pengembangan piranti lunak komputer yang diakui sebagai aset dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya (tidak lebih dari empat tahun).

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan riviú periodik atas aset tak-berwujud untuk memastikan periode amortisasi dan metode amortisasi masih sesuai dengan estimasi sebelumnya.

i. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Nilai tercatat dari aset yang bukan aset keuangan milik Perusahaan, kecuali aset pajak tangguhan, ditelaah setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika indikasi tersebut ada, maka nilai yang dapat dipulihkan dari aset tersebut akan diestimasi.

Nilai yang dapat diperoleh kembali dari suatu aset atau unit penghasil kas adalah sebesar jumlah yang lebih tinggi antara nilai pakainya dan nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap nilai kas kini dan risiko spesifik terhadap aset tersebut.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, aset yang tidak dapat diuji secara individual akan digabungkan dalam kelompok yang lebih kecil yang memberikan arus kas masuk dari penggunaan berkelanjutan yang sebagian besar independen terhadap arus kas masuk atas aset lainnya atau kelompok aset ("unit penghasil kas" atau "UPK").

Penyisihan penurunan nilai diakui jika nilai tercatat dari suatu aset atau UPK melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Penyisihan penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset non keuangan, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi.

j. Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil

Pendapatan bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tetap mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umum dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

j. Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil (Lanjutan)

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

k. Aset Lain-Lain

Merupakan aset diluar *software* dengan kriteria aset ini dapat memberikan manfaat ekonomi masa datang, dan dapat memberikan nilai lebih bagi Perusahaan dan untuk mendapatkannya akibat dari transaksi atau kejadian.

l. Sewa

Pada awal masa sewa, *lessee* mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa. Aset sewaan yang dimiliki oleh *lessee* dengan dasar sewa pembiayaan disusutkan konsisten dengan metode yang sama yang digunakan untuk aset yang dimiliki sendiri, atau disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaat aset sewaan, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa *lessee* kepemilikan pada akhir masa sewa.

Selisih lebih hasil penjualan dan nilai tercatat yang terjadi dari suatu transaksi jual dan sewa-balik ("*sale-and-lease back*") yang merupakan sewa pembiayaan ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus ("*straight-line method*") selama sisa manfaat aset yang bersangkutan.

m. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam Rupiah untuk mencerminkan nilai kurs rata-rata antara kurs jual dan kurs beli yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada hari terakhir transaksi perbankan pada tahun tersebut. Laba atau rugi selisih kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

n. Imbalan Kerja Karyawan

Perusahaan mengakui kewajiban kerja karyawan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 11/2020 tanggal 02 November 2020 ("Undang-Undang") dan PSAK No. 24, "Imbalan Kerja".

Perusahaan menerapkan PSAK No. 24, "Imbalan Kerja". Revisi SAK ini antara lain memperbolehkan entitas untuk menerapkan metode sistematis atas pengakuan yang lebih cepat dari keuntungan/kerugian aktuarial yang timbul dari imbalan pasti, antara lain pengakuan langsung keuntungan/kerugian yang terjadi pada tahun berjalan ke dalam pendapatan komprehensif lain.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

n. Imbalan Kerja Karyawan (Lanjutan)

Perusahaan memilih metode ini dalam pengakuan keuntungan/kerugian aktuarial, karenanya penerapan awal PSAK No. 24 (Revisi 2013) ini berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Untuk program iuran pasti, kontribusi yang terutang diakui sebagai beban pada tahun berjalan.

Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), beban imbalan pasca kerja manfaat pasti ditentukan dengan metode penilaian aktuarial *Projected Unit Credit* dan keuntungan dan kerugian aktuarial diakui pada tahun dimana keuntungan dan kerugian terjadi dalam pendapatan komprehensif lain.

Biaya jasa lalu atas pengenalan program manfaat pasti atau perubahan utang imbalan dari program yang ada diamortisasi sepanjang tahun sampai imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*.

Beban imbalan jangka panjang lainnya ditentukan dengan metode penilaian aktuarial *Projected Unit Credit* di mana keuntungan dan kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu langsung diakui dalam tahun berjalan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar di antara 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal tersebut dan 10% dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian ini diakui dengan metode garis lurus sepanjang rata-rata sisa masa kerja dari karyawan.

o. Pajak Penghasilan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan" yang menetapkan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan mendatang dari pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan transaksi dan kejadian lain dari tahun kini yang diakui dalam laporan keuangan. SAK revisi ini juga mensyaratkan entitas untuk mencatat kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perusahaan juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" Penerapan awal SAK revisi ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer pada setiap tanggal laporan antara aset dan kewajiban untuk tujuan komersial aset dan kewajiban untuk tujuan perpajakan. Manfaat pajak masa yang akan datang, seperti rugi pajak yang dapat dikompensasi, juga diakui apabila besar kemungkinan manfaat tersebut dapat direalisasi.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada operasi tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan atas kewajiban perpajakan dicatat ketika ketetapan pajak diterima atau jika keberatan diajukan oleh Perusahaan, ketika hasil dari keberatan tersebut telah ditentukan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

p. Imbal Jasa Penjaminan, Imbal Jasa Kafalah, *Fee Based Income* Bank Pelaksana, dan Beban Regaransi

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi diakui sejak Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK) diterbitkan.

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan, Imbal Jasa Kafalah, *fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi diakui selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK).

Batas waktu maksimal pengakuan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi adalah 4 tahun dan diakui ulang tahun. Mulai November 2016 pengakuan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income*, biaya komisi agen dan beban regaransi diakui sesuai jangka waktu penjaminan.

Pendapatan imbalan jasa penjaminan/ kafalah disajikan secara bruto sebelum dikurangkan beban komisi agen, beban *co-guarantee* dan beban *re-guarantee*.

Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK) yang sudah diterima namun belum diakui sebagai pendapatan disajikan sebagai pendapatan diterima dimuka. *Fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi yang sudah dibayarkan namun belum diakui sebagai beban disajikan sebagai beban dibayar dimuka.

Sejak 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK No. 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan dijanjikan dalam kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki pengendalian atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yaitu:

- a. Kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu
Perusahaan mengalihkan pengendalian barang atau jasa sepanjang waktu, umumnya Perusahaan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu jika pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja Perusahaan saat Perusahaan melaksanakan kewajiban pelaksanaannya tersebut.
- b. Kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan pada waktu tertentu
Jika kewajiban pelaksanaan tidak diselesaikan sepanjang waktu, maka Perusahaan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu. Untuk menentukan waktu tertentu dimana pelanggan memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan Perusahaan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

p. Imbal Jasa Penjaminan, Imbal Jasa Kafalah, *Fee Based Income* Bank Pelaksana, dan Beban Regaransi (Lanjutan)

Besarnya tarif imbal jasa penjaminan ditentukan berdasarkan hasil dari identifikasi hak dan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, dalam perspektif bisnis penjaminan, hak dan kewajiban dimaksud merupakan risiko yang akan dan telah dialihkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam kontrak. Kontrak dimaksud memiliki jangka waktu pelaksanaan, maka dari itu kewajiban pelaksanaan entitas diukur berdasarkan risiko yang akan dan telah dilepas sepanjang kontrak berlaku.

Pendapatan imbal jasa penjaminan diakui sejak bulan sertifikat penjaminan diterbitkan dan diamortisasi sesuai dengan besarnya risiko yang terealisasi sepanjang jangka waktu penjaminan.

Imbal jasa penjaminan atas risiko yang dialihkan ke penjamin ulang diakui sebagai beban premi penjaminan ulang yang diakui sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan. Biaya-biaya atas perolehan kontrak diakui sebagai biaya inkremental, biaya tersebut secara eksplisit dibebankan kepada pelanggan, biaya tersebut diamortisir secara sistematis sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan. Penerimaan dari pelanggan atas risiko yang belum terealisasi diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.

q. Utang Klaim

Utang klaim merupakan utang Perusahaan kepada bank pemberi pinjaman yang dijamin oleh Perusahaan. Utang klaim yang tercatat adalah utang yang telah diproses dan disetujui namun belum dibayar. Utang klaim dinyatakan sebesar prosentase penjaminan atas baki debit pinjaman yang macet.

r. Cadangan Klaim

Estimasi atas klaim yang terjadi baik sudah dilaporkan maupun belum dilaporkan diakui sebagai cadangan klaim. Perusahaan telah membentuk cadangan klaim sesuai dengan PSAK 71 terkait kontrak jaminan. Cadangan klaim dihitung menggunakan basis *Estimated Credit Loss (ECL)* dengan memperhatikan faktor-faktor makro ekonomi terkait yang berhubungan dengan kemungkinan klaim terjadi.

Estimasi klaim atas risiko yang telah dialihkan ke penjaminan ulang diakui sebagai piutang penjamin ulang dan diukur secara sistematis sesuai dengan pola pengukuran cadangan klaim yang didasari dari selisih antara total saldo penjaminan bruto dan total saldo penjaminan netto.

Perubahan jumlah utang klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah utang klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya perubahan.

Hak subrogasi atas klaim diakui sebagai pendapatan subrogasi pada saat hak subrogasi dapat direalisasi.

s. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor,
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
 - iii. Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

s. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi (Lanjutan)

2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Perusahaan yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain),
- ii. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Perusahaan, dimana entitas lain tersebut
- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama,
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga,
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor,
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a),
- vii. Orang yang diidentifikasi, dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan persyaratan dan kondisi yang sama dengan yang diberlakukan kepada pihak ketiga telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

t. Beban Klaim

Beban klaim setelah dikurangi bagian penjamin ulang, dicatat pada saat terjadinya kerugian. Beban klaim yang telah disetujui oleh komite klaim namun belum dilakukan pembayaran dicatat sebagai utang klaim.

u. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (LANJUTAN)

Pertimbangan (Lanjutan)

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Perusahaan mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Perusahaan mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Perusahaan mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (LANJUTAN)

Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

b. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari aset tetap Perusahaan diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap tersebut.

c. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perusahaan.

d. Imbalan Kerja jangka Panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 19 dan mencakup, antara lain, tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Perusahaan diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara umum berdampak pada beban yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

e. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat asset pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

f. Cadangan Klaim dan Piutang Regaransi

Cadangan klaim dan Piutang Regaransi diukur dengan mengacu pada penurunan nilai yang diatur dalam PSAK 71, dan estimasian yang dibentuk dengan mempertimbangkan perkembangan klaim yang telah terjadi, nilai seluruh penjaminan, faktor ekonomi yang relevan dan terkorelasi, serta probabilitas tertimbang atas skenario-skenario ekonomi yang mungkin terjadi.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

4. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas	12,939,812	117,532,482
Giro Bank		
Bank Umum	14,217,979,225	7,425,404,257
Bank BPR Syariah	2,956,505,378	2,138,374,089
Bank BPR	3,040,922,157	3,470,608,215
Bank Umum Syariah	1,297,101,506	1,934,518,294
Jumlah Giro Bank	21,512,508,266	14,968,904,856
Deposito		
Bank Umum	123,975,738,918	97,221,502,633
Bank BPR Syariah	26,000,000,000	26,750,000,000
Bank Umum Syariah	40,350,000,000	35,050,000,000
Bank BPR	16,365,000,000	17,165,000,000
Jumlah Deposito	206,690,738,918	176,186,502,633
Jumlah Kas dan Setara Kas	228,216,186,996	191,272,939,971
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(539,940,790)	(878,876,521)
Jumlah Kas dan Setara Kas - Bersih	227,676,246,206	190,394,063,450

Penempatan deposito PT Jamkrida Jabar pada tanggal 31 Desember 2023 di beberapa bank di Indonesia mendapatkan tingkat suku bunga dari 2,50% p.a. s/d 9,50% p.a dan per 31 Desember 2022 mendapatkan tingkat suku bunga dari 2,50% p.a. s/d 11,00% p.a.

Perubahan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo Awal	878,876,521	4,405,112,016
Pemulihan Tahun Berjalan	(338,935,731)	(3,526,235,495)
Saldo Akhir	539,940,790	878,876,521

5. PIUTANG RE/COGARANSI

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Re/Cogaransi	123,709,188,934	74,164,489,516
Piutang Estimasi	11,160,909,595	9,324,486,656
Jumlah Piutang Re/Cogaransi	134,870,098,529	83,488,976,172
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(5,668,419,657)	(5,226,122,382)
Jumlah Piutang Re/Cogaransi - Bersih	129,201,678,872	78,262,853,790

Perubahan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo Awal	5,226,122,382	4,560,598,252
Pemulihan Tahun Berjalan	--	665,524,130
Penyisihan Tahun Berjalan	442,297,276	--
Saldo Akhir	5,668,419,657	5,226,122,382

Piutang Re/Cogaransi merupakan tagihan atas klaim dan restitusi kepada broker PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (JAKRE), PT Jamkrida Banten dan PT Igna Asia Broker and Insurance (IGNA).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, piutang estimasi atas Re/Cogaransi masing-masing sebesar Rp11.160.909.595 dan Rp9.324.486.657 (Lihat catatan 18).

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

6. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang masih harus diterima pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan <i>Management Fee</i>	20,029,851,774	8,444,160,459
Pendapatan Bunga Investasi	2,115,156,457	1,580,374,425
Jumlah Pendapatan yang Masih Harus Diterima	22,145,008,231	10,024,534,884
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(213,564,612)	(213,564,612)
Jumlah Pendapatan yang Masih Harus Diterima - Bersih	21,931,443,619	9,810,970,272

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan bunga investasi yang berasal dari deposito, pendapatan kupon obligasi atas investasi, komisi atas Re/Cogaranansi (*management fee*).

Perubahan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo Awal	213,564,612	852,506,852
Pemulihan Tahun Berjalan	--	(638,942,240)
Penyisihan Tahun Berjalan	--	--
Saldo Akhir	213,564,612	213,564,612

Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian merupakan cadangan atas pendapatan *management fee*

7. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Karyawan	176,503,912	666,139,746
Piutang Lainnya	47,288,012	6,764,309
Jumlah Piutang Lain-lain	223,791,924	672,904,055

8. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Beban dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari :

a. Beban Dibayar Dimuka Jangka Pendek

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
IJP Re/Cogaranansi	15,690,522,720	18,354,472,145
Biaya Akuisisi	11,200,931,416	5,036,098,677
Beban Klaim Ditangguhkan	3,198,204,350	-
Beban Operasional Dibayar Dimuka	434,328,967	519,509,842
Uang Muka	267,312,889	130,418,335
Jumlah Beban Dibayar Dimuka Jangka Pendek	30,791,300,342	24,040,498,999

Beban klaim ditangguhkan merupakan klaim yang masih dalam proses pemeriksaan atas penjaminan bersama dengan PT Jamkrida Jakarta.

b. Beban Dibayar Dimuka Jangka Panjang

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
IJP Re/Cogaranansi	77,981,060,149	54,118,007,551
Biaya Akuisisi	21,263,850,192	21,496,731,367
Jumlah Beban Dibayar Dimuka Jangka Panjang	99,244,910,341	75,614,738,918

Beban operasional dibayar dimuka dialokasikan sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus. Masa manfaat asuransi kendaraan, asuransi kesehatan dan sewa kendaraan sesuai dengan jangka waktu kontrak atau polis.

Beban IJP Re/Cogaranansi, Biaya Akuisisi diamortisasi sesuai dengan pola pengakuan Imbal Jasa Penjaminan dengan menggunakan pola risiko.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

8. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA (LANJUTAN)

Imbal jasa penjaminan atas resiko yang dialihkan ke penjamin ulang diakui sebagai beban premi penjaminan ulang yang diakui sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan. Biaya-biaya atas perolehan kontrak diakui sebagai biaya inkremental, biaya tersebut secara eksplisit dibebankan kepada pelanggan, biaya tersebut diamortisir secara sistematis sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan. Penerimaan dari pelanggan atas resiko yang belum terealisasi diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.

Beban dibayar dimuka Re/Cogaransi merupakan pembayaran IJP dan IJK tahun berjalan dan tahun-tahun lalu ke mitra Re/Cogaransi yang akan menjadi beban di tahun-tahun mendatang.

Manajemen berkeyakinan biaya dibayar dimuka untuk IJP dan IJK Re/Cogaransi dan fee based income bank telah dialokasikan sesuai jangka waktu penjaminan.

9. SURAT BERHARGA

Aset Keuangan yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif

Surat Berharga	Kupon	Jatuh Tempo	Rating	31 Desember 2023	31 Desember 2022
FR 72	8.25%	15/05/2036	--	22,000,000,000	34,000,000,000
FR 68	8.38%	15/03/2034	--	17,000,000,000	24,000,000,000
FR 76	7.38%	15/05/2048	--	20,500,000,000	9,000,000,000
FR 80	7.50%	15/06/2035	--	-	7,000,000,000
PBS 012	8.60%	15/04/2034	--	7,000,000,000	7,000,000,000
FR 92	7.13%	15/06/2042	--	-	3,000,000,000
FR 89	6.88%	15/05/2051	--	5,000,000,000	5,000,000,000
FR 79	8.38%	15/04/2039	--	4,000,000,000	--
PBS 15	8.00%	15/07/2047	--	7,000,000,000	--
PBS 025	8.38%	15/05/2033	--	2,000,000,000	2,000,000,000
PBS 5	6.75%	15/04/2043	--	5,000,000,000	--
FR 67	8.75%	15/02/2044	--	5,000,000,000	--
PT PP THP I 2020	9.90%	27/02/2023	idA	--	1,000,000,000
Harga Perolehan				94,500,000,000	92,000,000,000
Amortisasi Nilai Premium (Diskonto)				9,751,419,357	8,452,099,375
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga				26,880,643	(1,718,111,915)
Jumlah Obligasi yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif				104,278,300,000	98,733,987,460
Reksadana					
RD Bahana Obligasi Ganesha Kelas I				15,000,000,000	-
Reksadana MNC Dana SBN				5,000,000,000	-
Reksadana Insight Money				8,000,000,000	-
Reksadana Insight Syariah				3,000,000,000	-
Harga Perolehan				31,000,000,000	-
Selisih Nilai Wajar Reksadana				93,464,156	-
Jumlah Reksadana				31,093,464,156	-

Aset Keuangan yang Diukur Pada Biaya Perolehan yang Diamortisasi

Surat Berharga	Kupon	Jatuh Tempo	Rating	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Hutama Karya	8.07%	06/06/2027	idAAA	6,000,000,000	6,000,000,000
FR 70	8.38%	15/03/2024		7,000,000,000	-
Harga Perolehan				13,000,000,000	6,000,000,000
Premium Obligasi				67,936,106	21,214,640
Jumlah Obligasi yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi				13,067,936,106	6,021,214,640
Jumlah Aset Keuangan				148,439,700,262	104,755,202,100
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian				-	(20,857,963)
Jumlah Aset Keuangan - Bersih				148,439,700,262	104,734,344,137

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

9. SURAT BERHARGA (LANJUTAN)

Aset Keuangan Perusahaan merupakan Investasi dalam bentuk Obligasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif dan obligasi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penentuan kategori aset keuangan dilakukan oleh manajemen.

Perubahan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo Awal	20,857,963	136,839,191
Pemulihan Tahun Berjalan	(20,857,963)	(115,981,228)
Penyisihan Tahun Berjalan	--	--
Saldo Akhir	--	20,857,963

10. PROPERTI INVESTASI

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo Awal	2,495,100,000	2,495,100,000
Penambahan	--	--
Keuntungan atas perubahan nilai wajar	131,866,820	--
Saldo Akhir	2,626,966,820	2,495,100,000

Akun properti investasi merupakan investasi dalam bentuk tanah dan bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan, tetapi untuk mendapatkan manfaat ekonomi bagi Perusahaan berupa pendapatan sewa.

Aset-aset tersebut telah dilakukan penilaian ulang oleh penilai independen pada tanggal 13 Maret 2023 dengan laporan yang diterbitkan oleh KJPP Patuh Ansori Rahman & Rekan No. 00001/2.0174-02/PI/09/0580/1/III/2023 dengan nilai sebesar Rp2.626.966.820.

11. ASET TETAP

	31 Desember 2023			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Inventaris Kantor	3,930,909,854	344,132,764	--	4,275,042,618
Kendaraan	4,205,575,000	--	--	4,205,575,000
Gedung	7,527,996,226	--	--	7,527,996,226
Tanah	3,463,500,000	--	--	3,463,500,000
Jumlah	19,127,981,080	344,132,764	--	19,472,113,844
Akumulasi penyusutan				
Inventaris Kantor	(2,440,544,865)	(449,326,470)	--	(2,889,871,335)
Kendaraan	(2,120,515,938)	(386,267,125)	--	(2,506,783,063)
Gedung	(1,205,704,762)	(175,653,245)	--	(1,381,358,007)
Jumlah	(5,766,765,565)	(1,011,246,840)	--	(6,778,012,405)
Nilai buku	13,361,215,515			12,694,101,439

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

11. ASET TETAP (LANJUTAN)

	31 Desember 2022			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Inventaris Kantor	2,919,270,578	1,011,639,276	--	3,930,909,854
Kendaraan	4,205,575,000	--	--	4,205,575,000
Gedung	7,528,000,029	--	3,803	7,527,996,226
Tanah	3,463,500,000	--	--	3,463,500,000
Jumlah	18,116,345,607	1,011,639,276	3,803	19,127,981,080
Akumulasi penyusutan				
Inventaris Kantor	(2,122,570,530)	(317,974,335)	--	(2,440,544,865)
Kendaraan	(1,716,769,251)	(403,746,687)	--	(2,120,515,938)
Gedung	(1,030,051,553)	(175,653,209)	--	(1,205,704,762)
Jumlah	(4,869,391,334)	(897,374,231)	--	(5,766,765,565)
Nilai buku	13,246,954,273			13,361,215,515

Perusahaan telah mengasuransikan aset tetap untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan bencana alam dengan nilai pertanggungan asuransi sebesar Rp18.259.210.350 pada PT Asuransi Jasa Raharja Putera.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke tiap-tiap akun aset tetap yang bersangkutan dan penyusutan dimulai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai tujuannya semula.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungkan.

12. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari :

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<i>Software</i>	1,425,197,003	1,076,474,755
Aset Dalam Penyelesaian	691,880,000	--
Aset Lainnya	82,200,000	46,200,000
Harga Perolehan Aset Lain-Lain	2,199,277,003	1,122,674,755
Akumulasi Amortisasi <i>Software</i>	(947,931,427)	(823,858,953)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(33,337,500)	(26,537,500)
Akumulasi Amortisasi Aset Lain-Lain	(981,268,927)	(850,396,453)
Nilai Buku Aset Lain-lain	1,218,008,076	272,278,302

Software merupakan lisensi perangkat lunak komputer dan diamortisasi selama 4 tahun.

Aset lainnya merupakan pemeringkatan atas PT Jamkrida Jabar dan sistem SDM PT Jamkrida Jabar dengan estimasi empat tahun dan metode amortisasi yang digunakan metode garis lurus.

Aset Dalam Penyelesaian Merupakan Aset yang masih dalam proses tahap pengerjaan dan belum siap digunakan,serta dimaksudkan untuk digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan usahanya. Jamkrida Jabar pada tahun 2023 memiliki sejumlah aset dalam proses terkait dengan pembuatan aplikasi ataupun upgrading aplikasi untuk menunjang kegiatan usahanya. Pekerjaan tersebut akan selesai paling lambat pada 21 Desember 2024.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

13. UTANG RE/COGARANSI

Utang Re/Cogaransi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang Regaransi:		
PT Igna Asia Reinsurance Broker & Consultant (IGNA)	2,721,951,143	37,001,290,686
PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (JAKRE)	89,747,425,285	1,196,535,490
PT Pialang Asuransi Dekai Indonesia	3,841,205,423	-
Jumlah Utang Re/Cogaransi	96,310,581,851	38,197,826,176

Utang kepada PT Jamkrida Jakarta PT Igna Asia Reinsurance Broker & Consultant (IGNA) dan PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (JAKRE) merupakan utang premi IJP dan IJK yang harus dibayarkan Perusahaan untuk mengalihkan risiko klaim yang diakibatkan meninggal, PHK dan macet atas terjamin atas Kredit Multiguna, KCR, Mikro dan Umum. Dicatat secara akrual sesuai dengan tarif yang ditetapkan Perusahaan.

14. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Beban yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari :

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Biaya Pegawai Yang Masih Harus dibayar	3,731,766,069	3,950,503,029
Beban Umum yang masih harus dibayar	549,118,218	44,822,218
Cadangan CSR	435,935,725	107,045,679
Biaya Komisi Agen	46,413,557	56,161,339
Jumlah Beban Yang Masih Harus Dibayar	4,763,233,569	4,158,532,265

Merupakan kewajiban Perusahaan yang masih harus dibayar kepada vendor atas kerjasama yang dilakukannya dengan PT Jamkrida Jabar, biaya keamanan, insentif dan uang makan, transport, bonus dan tantiem, uang lembur karyawan serta biaya komisi agen bulan Desember 2023 yang biasa dibayarkan setiap tanggal 7 bulan berikutnya.

15. PENAMPUNGAN SEMENTARA

Penampungan sementara per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Penampungan IJP Bank Umum	18,455,625,416	12,951,830,607
Penampungan IJP Bank Syariah	4,217,301,720	901,305,060
Penampungan IJP Bank BPR	1,646,316,707	1,315,663,011
Jumlah Penampungan Sementara IJP	24,319,243,843	15,168,798,678
Penampungan Sementara Subrogasi	254,356,499	2,484,090,015
Jumlah Penampungan Sementara	24,573,600,342	17,652,888,693

Akun Penampungan IJP terdiri dari Imbal Jasa Penjaminan yang telah diterima namun belum diterbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK)-nya, serta kelebihan pembayaran IJP dan IJK.

Penampungan sementara subrogasi merupakan bagian yang harus dibayar kepada pihak Re/Cogaransi atas pendapatan subrogasi yang telah diterima oleh perusahaan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

16. UTANG LANCAR LAINNYA

Utang lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang Lancar Lain-lain	12,499,978	33,000,000
Hutang Karyawan	-	244,768
Jumlah Utang Lancar Lainnya	12,499,978	33,244,768

17. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

a. Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Imbal Jasa Penjaminan Jangka Pendek	61,980,253,714	40,025,992,551
Imbal Jasa Kafalah Jangka Pendek	13,930,021,206	3,970,695,397
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek	75,910,274,920	43,996,687,948

b. Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Imbal Jasa Penjaminan Jangka Panjang	129,770,352,419	117,456,394,815
Imbal Jasa Kafalah Jangka Panjang	458,544,087	4,117,012,987
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang	130,228,896,506	121,573,407,802

Imbal Jasa Penjaminan dan Imbalan Jasa Kafalah diterima dimuka merupakan pembayaran IJP dan IJK penjaminan tahun berjalan dari Terjamin kepada Perusahaan yang akan menjadi pendapatan di tahun-tahun mendatang.

Besarnya tarif imbal jasa penjaminan ditentukan berdasarkan hasil dari identifikasi hak dan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, dalam perspektif bisnis penjaminan, hak dan kewajiban dimaksud merupakan risiko yang akan dan telah dialihkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam kontrak. Kontrak dimaksud memiliki jangka waktu pelaksanaan, maka dari itu kewajiban pelaksanaan entitas diukur berdasarkan risiko yang akan dan telah dilepas sepanjang kontrak berlaku.

Pendapatan imbal jasa penjaminan diakui sejak bulan sertifikat penjaminan diterbitkan dan diamortisasi sesuai dengan besarnya risiko yang terealisasi sepanjang jangka waktu penjaminan.

18. CADANGAN KLAIM

Cadangan klaim pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari :

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo Awal	15,062,088,847	18,908,364,728
Pembentukan (Pemulihan) Cadangan Klaim	4,203,085,067	(3,846,275,881)
Jumlah Cadangan Klaim	19,265,173,914	15,062,088,847

Piutang Estimasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari :

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo Awal	9,324,486,657	12,545,147,099
Pembentukan (Pemulihan) Piutang Estimasi	1,836,422,938	(3,220,660,443)
Jumlah Piutang Estimasi	11,160,909,595	9,324,486,657

Cadangan Klaim merupakan pembentukan cadangan atas klaim yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun mendatang atas penjaminan yang belum jatuh tempo.

Cadangan klaim minimal yang dibentuk telah sesuai dengan PSAK 71 terkait kontrak jaminan, cadangan klaim dihitung menggunakan basis *Estimated Credit Loss (ECL)* dengan memperhatikan faktor-faktor makro ekonomi terkait yang berhubungan dengan kemungkinan klaim terjadi.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari :

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	1,979,584,799	1,627,086,117
Kewajiban Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	442,743,032	348,652,801
Jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2,422,327,831	1,975,738,918

Standar akuntansi PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" berlaku efektif untuk laporan keuangan dengan periode dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2015 dan diterapkan secara retrospektif.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja berikut didasarkan pada Laporan Aktuaris yang dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuaria dengan rincian sebagai berikut:

Imbalan Pasca Kerja

a. Rekonsiliasi NKKIP dan Nilai Wajar Aset Program atas Aset dan Kewajiban

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	1,979,584,799	1,627,086,117
Nilai wajar Aset	--	--
Status Pendanaan	1,979,584,799	1,627,086,117
Jumlah lain yang diakui	--	--
Kewajiban diakui di laporan posisi keuangan	1,979,584,799	1,627,086,117

b. Mutasi Kewajiban dan Aset yang Diakui di Laporan Posisi Keuangan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kewajiban awal periode	1,627,086,117	1,834,011,406
Penyesuaian metode atribusi		(177,337,070)
Beban yang diakui di laba/rugi	351,018,586	9,338,316
Kerugian (keuntungan) komprehensif lainnya	1,480,096	21,751,465
Penyesuaian atas koreksi		--
Pembayaran Manfaat		(60,678,000)
Kewajiban akhir periode	1,979,584,799	1,627,086,117

c. Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Biaya jasa kini	243,631,528	246,749,158
Biaya bunga	107,387,058	119,497,236
Biaya jasa lalu vested	--	(356,908,078)
Jumlah Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi	351,018,586	9,338,316

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (LANJUTAN)

Imbalan Pasca Kerja (Lanjutan)

d. Pengakuan (Keuntungan) Kerugian Aktuarial

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Keuntungan) kerugian aktuarial yang belum diakui pada awal periode akuntansi	--	--
(Keuntungan) kerugian aktuarial - kewajiban	1,480,096	21,751,465
Jumlah (keuntungan) kerugian aktuarial yang diakui	1,480,096	21,751,465

e. Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya yang diakui

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari kewajiban	1,480,096	21,751,465
Perubahan lainnya	--	--
Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya yang diakui	1,480,096	21,751,465

f. Akumulasi Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya yang diakui

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya awal periode	361,373,180	339,621,715
Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya tahun berjalan	1,480,096	21,751,465
Saldo Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya akhir periode	362,853,276	361,373,180

Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Program Imbalan Kerja jangka Panjang Lainnya berdasarkan Peraturan Perusahaan yang mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya dalam bentuk cuti besar.

Perusahaan memberikan 2 (dua) bulan cuti panjang bagi karyawan yang masih aktif selama 6 (enam) tahun masa kerja dan kelipatannya yang akan diberikan di tahun ke 7 (tujuh) dan ke 8 (delapan), masing-masing selama 1 (satu) bulan.

a. Rekonsiliasi NKKIP dan Nilai Wajar Aset Program atas Aset dan Kewajiban

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	442,743,032	348,652,801
Nilai wajar Aset	--	--
Status Pendanaan	442,743,032	348,652,801
Jumlah lain yang diakui	--	--
Kewajiban diakui di laporan posisi keuangan	442,743,032	348,652,801

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (LANJUTAN)

Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (Lanjutan)

b. Mutasi Kewajiban dan Aset yang Diakui di Laporan Posisi Keuangan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kewajiban awal periode	348,652,801	292,341,214
Beban yang diakui di laba/rugi	94,090,231	56,311,587
Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya tahun berjalan	-	-
Kewajiban akhir periode	442,743,032	348,652,801

c. Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Biaya jasa kini	85,493,607	87,905,074
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(20,090,079)	(19,921,715)
Biaya Jasa lalu	-	(32,421,805)
Perubahan Asumsi Keuangan	5,344,735	-
Biaya bunga	23,341,968	20,750,033
Jumlah Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi	94,090,231	56,311,587

Asumsi utama yang digunakan sebagai berikut:

Dalam mengestimasi manfaat pensiun per 31 Desember 2023 dan 2022 untuk kedua program tersebut di atas, Aktuaris dalam perhitungannya menggunakan *Projected Unit Credit Actuarial Cost Method*, yang perhitungannya mengacu kepada tingkat pembiayaan yang sebenarnya diperlukan dalam satu periode. Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Tingkat Diskonto	6.75%	7.25%
Kenaikan Gaji per Tahun	6%	6%
Tabel Mortalita	100% TMI4	100% TMI4
Tingkat Cacat	5% TMI4	5% TMI4
Usia Pensiun Normal	58 tahun	58 tahun

20. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
PPh Pasal 21	2,257,911,075	1,037,987,551
PPh Pasal 29	1,282,950,680	-
PPh 4 ayat 2	244,501,713	182,153,305
PPh Pasal 23	47,506,387	31,593,125
Jumlah Utang Pajak	3,832,869,855	1,251,733,981

Utang pajak PPh Pasal 21 adalah utang pajak atas pajak pendapatan karyawan pada 31 Desember 2023 yang menjadi tanggungan perusahaan dan pajak atas pendapatan Direksi dan Komisaris yang dipotong oleh perusahaan. Utang pajak Pasal 23 adalah utang pajak dikarenakan pihak perusahaan sebagai pemotong pajak atas kegiatan yang diatur dalam PPh pasal 23 tersebut.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

20. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

b. Beban Pajak

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Laba Sebelum Pajak	13,255,362,296	20,484,683,378
Perbedaan Temporer:		
Beban Imbalan Pasca Kerja	445,108,817	(172,365,158)
Perbedaan Penyusutan antara Fiskal dan Komersil	(203,848,636)	(124,847,989)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	82,503,581	(3,615,634,833)
Kenaikan Cadangan Klaim	2,366,662,130	(625,615,439)
Jumlah	2,690,425,893	(4,538,463,419)
Perbedaan Permanen:		
Beban Promosi	3,456,519,012	1,846,679,177
Beban Perjalanan Dinas	1,909,304,563	1,132,983,490
Tunjangan Kesehatan	396,874,907	356,209,879
Beban Umum Lainnya	703,345,544	1,024,626,132
Beban Representasi	1,200,647,479	833,199,851
Tunjangan Baju	154,302,240	177,132,331
Beban Diklat Karyawan	209,170,096	381,365,331
Pemeliharaan Kendaraan	280,118,555	182,012,954
Jumlah	8,310,282,396	5,934,209,145
Pendapatan yang Dikenakan PPh Final:		
Pendapatan Bunga Deposito Dan Bagi Hasil	(8,282,580,604)	(5,841,200,691)
Pendapatan Obligasi	(7,593,317,395)	(6,751,354,652)
Pendapatan Jasa Giro	(359,532,580)	(368,684,226)
Keuntungan Penjualan Surat Berharga	(1,772,511,927)	(308,528,841)
PPh Pasal 4 (2) Bunga Deposito	1,680,708,641	1,147,065,206
PPh Pasal 4 (2) Kupon Obligasi	778,088,536	671,010,581
PPh Pasal 4 (2) Bunga Jasa Giro	72,453,965	73,832,926
PPh Pasal 4 (2) Penjualan Efek	175,850,000	15,462,768
Jumlah	(15,300,841,364)	(11,362,396,930)
Jumlah koreksi fiskal	(4,300,133,076)	(9,966,651,203)
Laba (Rugi) Fiskal Tahun Berjalan	8,955,229,220	10,518,032,175
Laba (Rugi) Fiskal (dibulatkan)	8,955,229,000	10,518,032,000
Kerugian Pajak Tahun 2018	--	(7,826,711,000)
Kerugian Pajak Tahun 2019	(5,030,548,000)	(5,030,548,000)
Kerugian Pajak Tahun 2020	(10,541,446,000)	(10,541,446,000)
Laba Pajak Tahun 2021	1,930,327,000	1,930,327,000
Laba Pajak Tahun 2022	10,518,032,000	10,518,032,000
Rugi fiskal yang dapat Dikompensasi	(3,123,635,000)	(10,950,346,000)
Laba fiskal setelah dikurangi akumulasi rugi fiskal	5,831,594,000	--
Beban pajak penghasilan (tarif 22%)	1,282,950,680	--

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

20. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

d. Pajak Tangguhan

31 Desember 2023				
	Saldo Awal	Laporan Perubahan Ekuitas	Laporan Laba Rugi	Saldo Akhir
Selisih penyusutan aset tetap	(37,725,030)	--	(44,846,700)	(82,571,730)
Cadangan klaim Bersih - Setelah dikurangi Piutang Estimasian	1,262,272,480		520,665,669	1,782,938,149
Beban Imbal Pasca Kerja	434,662,563	325,621	97,923,940	532,912,124
Selisih Nilai Wajar Keuntungan Surat Berharga Tersedia Untuk Dijual	377,984,621	(382,016,717)	--	(4,032,096)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	1,394,672,725	18,150,788	--	1,412,823,513
Kerugian Fiskal yang dapat dikompensasi	2,409,076,036	--	(2,409,076,036)	-
Jumlah	5,840,943,396	(363,540,308)	(1,835,333,128)	3,642,069,959

31 Desember 2022				
	Saldo Awal	Laporan Perubahan Ekuitas	Laporan Laba Rugi	Saldo Akhir
Selisih penyusutan aset tetap	(10,258,472)	--	(27,466,558)	(37,725,030)
Cadangan klaim Bersih - Setelah dikurangi Piutang Estimasian	1,399,907,877	--	(137,635,397)	1,262,272,480
Beban Imbal Pasca Kerja	467,797,576	108,161,373	(141,296,386)	434,662,563
Selisih Nilai Wajar Keuntungan Surat Berharga Tersedia Untuk Dijual	(102,645,206)	480,629,827	--	377,984,621
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	2,182,415,988	--	(787,743,263)	1,394,672,725
Kerugian Fiskal yang dapat dikompensasi	6,597,567,376	--	(4,188,491,340)	2,409,076,036
Jumlah	10,534,785,140	588,791,199	(5,282,632,943)	5,840,943,396

21. EKUITAS

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Penyertaan Modal	260,280,000,000	203,200,000,000
Cadangan Umum	50,195,706,826	44,817,709,373
Saldo Laba	10,155,229,277	15,202,050,435
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga	22,848,546	(1,340,127,293)
Selisih pengukuran kembali kewajiban imbalan pasca kerja	(283,025,555)	(281,871,080)
Jumlah Ekuitas	320,370,759,094	261,597,761,434

Berdasarkan akta notaris Yulianti Idawati, S.H., Sp.N, No. 3 tanggal 3 Oktober 2012, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp300.000.000.000 dari 30.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000, dan berdasarkan akta No. 60 tanggal 26 Desember 2012 dari notaris yang sama tentang keputusan para pemegang saham diluar rapat perseroan terbatas PT Jamkrida Jabar (keputusan sirkuler) memutuskan:

- I. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil bagian 145.000 (seratus empat puluh lima ribu) lembar saham atau sebesar Rp 145.000.000.000 dengan tiga tahap penyetoran yaitu:
 - a. Tahap pertama sebelum penandatanganan akta sebesar Rp 25.000.000.000.
 - b. Tahap kedua sesudah penandatanganan akta sebesar Rp 75.000.000.000.
 - c. Tahap ketiga sesudah penandatanganan akta sebesar Rp 45.000.000.000.
- II. Yakes Pegawai Bank BJB mengambil bagian 20 (dua puluh) lembar saham atau sebesar Rp 200.000.000.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

21. EKUITAS (LANJUTAN)

Setoran modal tahap pertama dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 937/1864/PM/LS/KEU tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp25.000.000.000 dan setoran modal dari Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank BJB pada tanggal 1 Nopember 2012 sebesar Rp200.000.000, kedua setoran modal dari para pemegang saham tersebut diterima pada Bank BJB No. rekening 00228688871001 atas nama PT Jamkrida Jabar.

PT Jamkrida Jabar telah menerima setoran modal tahap kedua dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp50.000.000.000 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/53/PM/LS/2013 tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp50.000.000.000.

PT Jamkrida Jabar telah menerima setoran modal tahap ketiga Pada tanggal 27 November 2013 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/2041/PM/LS/2013 terdapat penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 25.000.000.000,-.

PT Jamkrida Jabar telah menerima setoran modal tahap keempat pada tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 937/1987/PM/LS/KEU dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp45.000.000.000,-

PT Jamkrida Jabar telah menerima setoran modal tahap kelima pada tanggal 9 Juni 2017 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 937/5/PM/LS/KEU dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp 8.000.000.000,-

PT Jamkrida Jabar telah menerima setoran modal tahap keenam pada tanggal 1 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 02.00/04.0/3/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.06/12/2022 dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp50.000.000.000,- Komposisi modal ditempatkan dan disetor. PT Jamkrida Jabar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 04 tertanggal 28 November 2023 PT Jamkrida Jabar telah menerima tambahan setoran modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 57.080.000.000 ,-

2023				
Keterangan	Saham (Lembar)	Nominal (Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	26,008	10,000,000	260,080,000,000	99.923%
YKP Bank BJB	20	10,000,000	200,000,000	0.077%
Jumlah	26,028		260,280,000,000	100%

2022				
Keterangan	Saham (Lembar)	Nominal (Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	20,300	10,000,000	203,000,000,000	99.90%
YKP Bank BJB	20	10,000,000	200,000,000	0.10%
Jumlah	20,320	20,000,000	203,200,000,000	100%

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jamkrida Jabar Nomor 11 tanggal 03 Juni 2022 yang dibuat oleh notaris Yanti Yulianti, SH., M.Kn. para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan Penggunaan Laba Bersih tahun 2021 sebesar Rp 10.585.165.700, dibagi untuk Cadangan Umum sebesar 46,70%, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebesar 2,50%, Dividen sebesar 28,90%, Tantiem dan Bonus sebesar 21,90%.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jamkrida Jabar Nomor 11 tanggal 11 Juni 2020 yang dibuat oleh notaris Mohamad Juania, SH., M.Kn. para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan Penggunaan Laba Bersih tahun 2019 sebesar Rp 3.907.910.588, dibagi untuk Cadangan Umum sebesar 25%, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebesar 2%, Dividen sebesar 51,10%, Tantiem dan Bonus sebesar 21,90%.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

22. PENDAPATAN PENJAMINAN

Imbal jasa penjaminan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Imbal Jasa Penjaminan/Kafalah	236,550,793,972	166,944,974,562
Beban Akuisisi	(35,601,464,854)	(24,228,085,654)
Restitusi IJP	(5,621,008,681)	(4,527,790,716)
<i>Management Fee</i>	27,629,983,137	19,458,760,127
Beban Regaransi	(108,944,082,531)	(73,770,797,298)
Jumlah Jasa Penjaminan Kredit	114,014,221,043	83,877,061,020

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK) adalah premi yang diterima oleh Perusahaan dari terjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan. Besarnya IJP dan IJK dihitung dari tarif IJP dan IJK, plafond kredit/pembiayaan dan jangka waktu kredit/pembiayaan.

Untuk kredit *eksisting*, besarnya tarif IJP ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain: produk penjaminan, risiko yang dijamin dan jangka waktu penjaminan.

Biaya komisi agen sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pada Nomor: 6/ POJK.05/2014 BAB II Pasal 4 (6) adalah maksimal sebesar 20% dari nilai Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK). Tarif biaya komisi agen dan *fee based income* bank yang berlaku di PT Jamkrida Jabar adalah sebesar 15% dan dibebankan selama jangka waktu penjaminan.

Mulai tahun 2019 Komisi Agen/Broker dan Fee Based Income Bank dijadikan satu menjadi biaya akuisisi.

23. PENDAPATAN INVESTASI

Pendapatan investasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan Kupon Obligasi Bruto	7,405,490,254	7,094,514,779
Pendapatan Bunga Deposito Bruto	6,832,974,682	4,505,038,408
Keuntungan Penjualan Surat Berharga	2,561,468,335	308,528,841
Pendapatan Bagi Hasil Deposito Bruto	1,489,764,105	1,336,162,283
Pendapatan Sewa Properti	13,000,000	35,495,000
Jumlah Pendapatan Investasi	18,302,697,376	13,279,739,311

24. BEBAN KLAIM

Beban klaim pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Klaim	82,747,342,207	51,328,319,346
Pembentukan (Pemulihan) Cadangan Klaim	2,366,662,130	(625,615,439)
Jumlah Beban Klaim	85,114,004,337	50,702,703,907

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

25. BEBAN USAHA

Beban usaha pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Sumber Daya Manusia	21,445,494,559	18,966,640,491
Beban Administrasi Kantor dan Umum	6,870,798,074	6,574,672,623
Beban Operasional	6,143,007,020	3,936,842,774
Jumlah Beban Usaha	34,459,299,653	29,478,155,888

Rincian Beban Operasional

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Promosi	3,457,694,062	1,905,905,025
Beban Perjalanan Dinas	1,909,304,563	1,132,983,490
Beban Kendaraan Dinas	601,328,640	563,535,088
Beban Penagihan Subrogasi	174,679,755	334,419,171
Jumlah Beban Operasional	6,143,007,020	3,936,842,774

Rincian Beban Sumber Daya Manusia

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Gaji dan Tunjangan Karyawan	9,075,846,420	7,367,457,992
Beban Bonus dan Tantiem	3,130,795,000	3,329,249,042
Gaji dan Tunjangan Direksi	2,070,125,860	2,204,253,561
Beban PPH 21	2,726,550,902	2,116,245,274
Beban Insentif	1,108,167,534	1,911,528,413
Gaji dan Tunjangan Komisaris	973,674,576	929,194,012
Beban Purna Jabatan	632,936,250	693,210,000
Beban Pengembangan SDM	933,223,452	418,709,255
Gaji dan Tunjangan Dewan Pengawas Syariah	314,480,000	96,800,000
Pembentukan (Pemulihan) Beban Imbal Pasca Kerja	445,108,817	(111,687,158)
Tunjangan SDM Lainnya	34,585,748	11,680,100
Jumlah Beban Sumber Daya Manusia	21,445,494,559	18,966,640,491

Rincian Beban Administrasi Kantor dan Umum

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Umum	3,599,444,010	3,860,103,876
Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset	1,011,246,839	897,374,231
Beban Pemeliharaan dan Asuransi Aset	796,440,767	880,375,516
Beban Administrasi	661,214,488	401,689,615
Beban Komunikasi dan Energi	612,778,450	425,726,690
Beban Amortisasi <i>Software</i> dan Aset Lainnya	130,872,474	80,379,542
Beban Sewa	43,491,845	15,949,922
Beban Pajak - Pajak	15,309,201	13,073,231
Jumlah Beban Administrasi Kantor dan Umum	6,870,798,074	6,574,672,623

26. PENDAPATAN SUBROGASI

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan Subrogasi		
Pendapatan Subrogasi Penjaminan Bank	2,519,757,010	1,924,565,589
Jumlah Pendapatan Subrogasi	2,519,757,010	1,924,565,589

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

27. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan Jasa Giro	359,641,821	368,684,226
Pendapatan Lainnya	425,189,360	12,213,635
Jumlah Pendapatan Lain-lain	784,831,182	380,897,860
Beban Lain-lain		
- Pemulihan (Kenaikan) CKKE Aset Keuangan	(82,503,581)	3,615,634,833
- PPh Pasal 4 (2) Penjualan Efek	(175,850,000)	(15,462,768)
- PPh Pasal 4 (2) Bunga Jasa Giro	(72,471,856)	(73,832,926)
- Beban Bukan Usaha Lainnya	(782,094)	(504,983,959)
- PPh Pasal 4 (2) Kupon Obligasi	(778,088,536)	(671,010,581)
- PPh Pasal 4 (2) Bunga Deposito	(1,683,144,257)	(1,147,065,206)
Jumlah Beban Lain-lain	(2,792,840,325)	1,203,279,394
Jumlah (Pendapatan) Beban Lain-lain	(2,008,009,143)	1,584,177,254

28. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, dimana manajemen berpendapat transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga, yang meliputi:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Dari Transaksi
Bank BJB	Pengendalian bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Giro, deposito dan penampungan sementara
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pemegang saham	Penyertaan Saham
YKP Bank BJB	Pemegang saham	Penyertaan Saham

29. INFORMASI TAMBAHAN

a. Kerja sama dengan perusahaan Asuransi

PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah bekerja sama dengan pihak asuransi untuk melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan kredit multiguna/pembiayaan murabahah/mudharabah bagi penerima kredit/pembiayaan, kerugian yang ditanggung adalah kerugian akibat risiko kematian.

PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah telah melakukan perjanjian kerja sama dengan:

- Bank BJB Syariah
- BPRS HIK Parahyangan
- BPRS Al Masoem
- BPRS Patriot Kota Bekasi
- BPRS Al Madinah Kota Tasikmalaya

b. Jenis-Jenis Produk Penjaminan Syariah

- Kafalah Pembiayaan Umum
- Kafalah Pembiayaan Multiguna
- Kafalah Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa
- Kafalah Pembiayaan Mikro
- Kafalah Pembiayaan Kepada BPRS
- Kafalah Kontra Bank Garansi

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

29. INFORMASI TAMBAHAN

c. Laporan Laba (Rugi) Syariah Tahun 2023 dan 2022

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan Penjaminan		
Imbal Jasa Kafalah	32,029,271,503	13,667,037,289
Beban Akuisisi	(4,810,589,848)	(2,200,316,022)
Manajemen Fee	2,545,504,142	1,309,580,285
Restitusi IJP	(235,843,550)	(225,084,466)
Beban Re/Cogaransi	(8,560,484,759)	(4,947,691,570)
Jumlah Pendapatan Penjaminan	20,967,857,488	7,603,525,516
Beban Klaim		
Beban Klaim	(12,407,600,370)	(2,879,319,534)
Pemulihan Cadangan Klaim	235,255,865	(265,356,089)
Jumlah Beban Klaim	(12,172,344,505)	(3,144,675,623)
Pendapatan Penjaminan Bersih	8,795,512,983	4,458,849,892
Pendapatan Investasi	2,359,666,976	2,229,270,534
Pendapatan Subrogasi	768,688,225	221,891,632
Pendapatan (Beban) Non Operasional	(12,266,062)	(950,931,148)
Beban Usaha	(4,087,865,346)	(1,794,786,230)
Laba Sebelum Pajak	7,823,736,776	4,164,294,681
Beban Pajak Kini	--	--
Manfaat Pajak Tangguhan	--	101,835,505
Laba Bersih Unit Syariah	7,823,736,776	4,266,130,186
Penghasilan Komprehensif		
Lain Yang Akan		
Direklasifikasikan		
Ke Laba Rugi		
Keuntungan (Kerugian)		
Aset Keuangan yang	186,581,495	(477,206,571)
Pajak Tangguhan Terkait		
Pengukuran Keuntungan	--	203,482,323
Jumlah Laba Komprehensif	186,581,495	(273,724,248)
Tahun Berjalan		
Laba Komprehensif	8,010,318,271	3,992,405,938

30. PERJANJIAN DAN PERIKATAN

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian dan perikatan, sebagai berikut:

- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten perihal penjaminan kredit mikro dan kecil, penjaminan kredit usaha.
- PT Nusantara Insurance Broker perihal Progran Penjaminan BJB Kredit Konsumer.
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten perihal penjaminan kredit modal kerja konstruksi, dan pengadaan barang/jasa.
- PT Brocade Insurance Broker tentang Program Tanggungan Asuransi BJB Kredit Konsumer.
- PT Jamkrida Banten perihal Kafalah Bersama (KOGARANSI)
- PT BPR Syariah Artha Fisabilillah perihal Kafalah Pembiayaan Umrah.
- PT BPR Syariah Artha Fisabilillah perihal Kafalah Pembiayaan Umrah.
- PT Rawikara Sembawa Mandiri tentang Mitra Keagenan Penjaminan pemberian penjaminan kredit/pembiayaan untuk membantu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
- PT Wahana Sentra Artha perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha Kepada Koperasi dan Perorangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).
- PT Wahana Sentra Artha perihal Penjaminan Kredit Konsumtif.
- PT Jakarta Inti Bersama Insurance Brokers perihal Jasa Konsultan dan Keperantaraan Penjaminan Kredit Konsumtif yang disalurkan oleh LKM.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

30. PERJANJIAN DAN PERIKATAN (LANJUTAN)

- PT Estetika Jasatama perihal Program Penjaminan Kredit Konsumer.
- PT Adonai Pialang Asuransi perihal Program Penjaminan BJB Kredit Konsumer.
- PT Kalibesar Raya Utama perihal Program Penjaminan BJB Kredit Konsumer
- PT Bank Perkreditan Rakyat Hayura Artalola perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha Kepada Koperasi dan Perorangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM)
- PT Bank Perkreditan Rakyat Hayura Artalola perihal Penjaminan Kredit Pola Potong Gaji.
- PT Global Risk Management perihal Penyelenggaraan Program Penjaminan Kredit Konsumtif Pada PT Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Melalui Mekanisme Pialang Asuransi.
- PT Bank Perkreditan Sinar Mas Pelita perihal Penjaminan Kredit Konsumtif dan Kredit Sertifikasi Guru.
- PT Bank Perkreditan Sinar Mas Pelita perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha kepada Koperasi dan Perorangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM)
- PT Adonai Pialang Asuransi perihal Program Penjaminan BJB Kredit Konsumer.
- PT Bank Jabar Banten Syariah perihal Kafalah Pembiayaan (*Cash Loans & Non Cash Loan*)
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung perihal Kafalah Pembiayaan Konsumtif Pola Potong Tunjangan Sertifikasi Guru.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Duta Pasundan perihal Penjaminan Kredit Konsumtif Pola Potong Tunjangan Sertifikasi Guru.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Patriot Bekasi tentang Kafalah Pembiayaan Konsumtif Pola Potong Tunjangan Sertifikasi Guru.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Baiturridha Pusaka perihal Kafalah Pembiayaan Pola Potong Gaji.
- Koperasi Simpan Pinjam (Kospin Jasa) dengan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penjaminan Bersama Pinjaman Produktif.
- PT Global Risk Management perihal Penyelenggaraan Program Penjaminan Pembiayaan Konsumtif pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Unit Usaha Syariah Melalui Mekanisme Pialang Asuransi.
- PT Fresnel Perdana Mandiri perihal Program Penjaminan BJB Kredit Konsumer.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria perihal Kafalah Pembiayaan Pola Potong Gaji.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria perihal Kafalah Pembiayaan Produktif.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Madinah Tasikmalaya perihal Kafalah Pembiayaan Pola Potong Gaji.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Madinah Tasikmalaya perihal Kafalah Pembiayaan Modal Usaha Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
- PERUM Bank Perkreditan Rakyat Garut perihal Penjaminan Kredit Pola Potong Gaji.
- PERUM Bank Perkreditan Rakyat Garut perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Astanajapura perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
- PT Igna Asia Reinsurance Brokers perihal Jasa Keperantaraan Pertanggungan Ulang (Reasuransi) Untuk Produk Penjaminan PT Jamkrida Jabar sebagai pengganti dari PT Best One Asia Reinsurance Brokers. Berdasarkan Berita Acara Pengalihan Portofolio Penjaminan Ulang PT Jamkrida Jabar, tanggal 11 Mei 2023 dan 10 maret 2023 peralihan portofolio tersebut sudah diketahui oleh PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional Re) dan PT Reasuransi Syariah Indonesia sebagai pihak penjaminan ulang.

31. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Penerbitan kembali laporan keuangan tanggal 5 April 2024.

Sebelumnya perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan 31 Desember 2023 pada tanggal 5 April 2024, dan memutuskan untuk menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut pada 29 April 2024 dengan perubahan dan tambahan pengungkapan atas catatan laporan keuangan sebagai berikut:

	Sebelum Penerbitan Kembali	Penyesuaian	Setelah Penerbitan Kembali
Laporan Posisi Keuangan			
Aset			
Piutang re/cogaransi			
Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(8,061,519,867)	2,393,100,210	(5,668,419,657)
Aset Pajak Tangguhan	4,607,477,661	(965,407,702)	3,642,069,959
Liabilitas			
Utang pajak	2,549,919,175	1,282,950,680	3,832,869,855
Ekuitas			
Saldo Laba	10,010,487,450	144,741,826	10,155,229,276

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

31. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

	Sebelum Penerbitan Kembali /Before	Penyesuaian	Setelah Penerbitan Kembali
Laporan Laba Rugi			
Pendapatan (Beban) Lainnya	(4,401,109,352)	2,393,100,209	(2,008,009,143)
Laba sebelum pajak	10,862,262,087	2,393,100,209	13,255,362,296
Beban Pajak Kini	-	(1,282,950,680)	(1,282,950,680)
Beban Pajak Tangguhan	(851,774,637)	(965,407,703)	(1,817,182,340)
Laba setelah pajak	10,010,487,450	144,741,826	10,155,229,276

32. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023. Laporan keuangan diterbitkan pada tanggal 29 April 2024.



PERNYATAAN MANAJEMEN

Bandung, 29 April 2024

Kepada :

Aryo Wibisono SE., CPA

KAP Hertanto, Grace, Karunawan

Palma Tower, Lantai 18

JI RA. Kartini II – S Kav. 6 Sektor 2

Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Surat representasi ini kami buat berkaitan dengan audit atas laporan keuangan PT Jamkrida Jabar untuk periode Dua Belas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 untuk tujuan menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kami menegaskan, berdasarkan keyakinan dan pengetahuan terbaik kami, kami telah meminta keterangan yang kami pandang perlu untuk memperoleh informasi yang tepat bagi kami:

A. Laporan Keuangan

- Kami telah memenuhi tanggung jawab kami, seperti yang disebutkan dalam syarat-syarat perikatan audit bertanggal 01 Februari 2024, untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; khususnya laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan kerangka tersebut.
- Asumsi-asumsi signifikan yang kami gunakan dalam membuat estimasi akuntansi, termasuk yang kami ukur pada nilai wajar, adalah masuk akal. (SA 540)
- Hubungan dan transaksi pihak berelasi telah kami pertanggung jawabkan dan kami sajikan dengan tepat sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. (SA 550)
- Semua peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan yang untuk itu Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan, telah kami sesuaikan atau kami ungkapkan. (SA 560)
- Dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi adalah tidak material, baik secara individual maupun dalam agregasi, terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Daftar kesalahan penyajian tidak dikoreksi kami lampirkan pada surat representasi ini. (SA 450)

A

- Sebelumnya kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00129/2.1000/AU.1/08/1290-4/1/IV/2024 bertanggal 5 April 2024 atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023 dengan opini wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali pada tanggal 29 April 2024 sebagaimana diungkapkan pada catatan 31 atas laporan keuangan.

Perusahaan melakukan perbaikan pencatatan transaksi cadangan kerugian kredit ekspektasian atas Piutang Re secara akumulatif sebesar Rp5.668.419.657 (PSAK 71), hal tersebut berdasarkan penilaian manajemen bahwa estimasi arus kas masa depan dari piutang tersebut dapat terealisasi di tahun 2025, pajak kini (PSAK 46) sebesar Rp 1.282.950.680, dan pajak tangguhan (PSAK 46) sebesar Rp 3.642.069.959. Terbentuknya pajak kini untuk laporan keuangan tahun 2023 didasarkan pada undang-undang harmonisasi perpajakan nomor 7 tahun 2021, Bab III tentang pajak penghasilan pasal 6 (2) yang menjelaskan bahwa, apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. Kemudian sebagaimana yang dijelaskan dalam PSAK 46 tentang pajak penghasilan paragraf 14 yang menjelaskan bahwa, jika rugi pajak digunakan untuk memulihkan pajak kini dari suatu periode sebelumnya, maka entitas mengakui manfaat tersebut sebagai aset pada periode di mana rugi pajak terjadi karena terdapat kemungkinan besar bahwa manfaat mengalir ke entitas dan manfaat tersebut dapat diukur secara andal. Ketidaksesuaian terkait pajak disebabkan karena rugi fiskal tahun 2018 masih menjadi faktor pengurang pajak tahun 2023, yang seharusnya sudah tidak dapat diperhitungkan sebagai kompensasi pajak penghasilan.

Menindaklanjuti pembahasan tersebut, Perusahaan menerbitkan kembali Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 dan mengajukan permintaan kepada KAP HGK untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan yang diterbitkan kembali dan melakukan penerbitan kembali (*Reissue*) Laporan Auditor Independen pada tanggal 31 Desember 2023.

Adapun Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebelum dan sesudah diterbitkan kembali oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	Sebelum penerbitan Kembali	Penyesuaian	Setelah penerbitan Kembali
Perubahan Penyajian			
Pendapatan (Beban) Lainnya	(4.401.109.352)	2.393.100.210	(2.008.009.143)
Laba Sebelum Pajak	10.862.262.087	2.393.100.210	13.255.362.297
Beban Pajak Kini	-	(1.282.950.680)	(1.282.950.680)
Beban Pajak Tangguhan	(851.774.637)	(965.407.703)	(1.817.182.340)
Laba Bersih	10.010.487.450	144.741.827	10.155.229.277

a

Adapun Laporan posisi keuangan sebelum dan sesudah diterbitkan kembali oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan	Sebelum penerbitan Kembali	Penyesuaian	Setelah penerbitan Kembali
<u>Perubahan Penyajian</u>			
<u>Aset</u>			
CKKE Piutang Re	(8.061.519.867)	2.393.100.210	(5.668.419.657)
Aset Pajak Tangguhan	4.607.477.661	(965.407.702)	3.462.069.959
<u>Liabilitas</u>			
Utang Pajak	2.549.919.175	1.282.950.680	3.832.869.855
<u>Ekuitas</u>			
Saldo Laba	10.010.487.450	144.741.827	10.155.229.277

- Kebijakan akuntansi yang kami terapkan adalah tepat.
- Semua rencana atau maksud yang mungkin secara material mengubah nilai tercatat atau klasifikasi aset dan liabilitas dalam laporan keuangan telah dicatat atau diungkapkan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
- Semua kewajiban, baik aktual dan kontijen, telah dicatat dan, bila sesuai, diungkapkan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
- Perusahaan memiliki kontrol atas semua aset diungkapkan dalam laporan keuangan dan, jika perlu, semua hak gadai atau sitaan atas aset tersebut telah diungkapkan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
- Kami telah memenuhi aspek perjanjian kontrak yang bisa berdampak material terhadap laporan keuangan dan kasus ketidakpatuhan telah diungkapkan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
- Kami telah mereviu semua aset keuangan dan kewajiban keuangan yang ada dan telah dikelompokkan dengan benar sebagai salah satu dari:
 - Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi,
 - Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi,
 - Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, atau
 - Liabilitas keuangan lainnya
 Sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dicatat secara tepat sebesar nilai wajarnya, nilai yang diamortisasi berdasarkan klasifikasinya. (PSAK 71, "Instrumen Keuangan")
- Kami telah menelaah nilai residu, umur manfaat, penurunan nilai dan penyusutan aset tetap dan kami berkeyakinan bahwa nilai residu, umur manfaat, penurunan nilai dan penyusutan aset tetap adalah konsisten dengan ekspektasi pola manfaat dari aset tersebut.

A

- Kami percaya bahwa asumsi dan metode yang digunakan untuk mengukur cadangan hak karyawan dan biaya jasa karyawan untuk tujuan akuntansi keuangan adalah tepat sesuai dengan kondisi Perusahaan saat ini. Perhitungan dan pengungkapan penyisihan imbalan kerja telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. (PSAK 24)
- Kami menyatakan pendapatan diakui apabila besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan mengalir kepada Perusahaan dan manfaat ini dapat diukur dengan andal.

B. Informasi yang Disediakan

- Kami telah memberikan kepada Saudara:
 - Akses ke seluruh informasi yang kami sadari relevan dalam penyusunan laporan keuangan seperti berbagai catatan, dokumentasi, dan hal-hal lainnya;
 - Informasi tambahan yang Saudara minta kepada kami untuk tujuan audit; dan
 - Akses yang tidak terbatas kepada individu dalam entitas yang Saudara butuhkan untuk memperoleh bukti audit.
- Semua transaksi telah dicatat dalam catatan akuntansi dan tercermin dalam laporan keuangan.
- Kami telah mengungkapkan kepada Saudara hasil penilaian kami atas risiko bahwa laporan keuangan mungkin mengandung kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan. (SA 240)
- Kami telah mengungkapkan kepada Saudara seluruh informasi yang berhubungan dengan kecurangan atau kecurangan yang diduga terjadi, yang kami ketahui dan berdampak terhadap Perusahaan serta melibatkan:
 - Manajemen
 - Karyawan yang memiliki peran signifikan dalam pengendalian internal; atau
 - Pihak lainnya, dimana kecurangan dapat berdampak material terhadap laporan keuangan. (SA 240)
- Kami telah mengungkapkan kepada Saudara seluruh informasi yang berhubungan dengan tuduhan kecurangan atau kecurangan yang diduga terjadi, yang mempengaruhi laporan keuangan Perusahaan yang dikomunikasikan oleh karyawan, mantan karyawan, analis, pembuat peraturan, atau lainnya. (SA 240)
- Kami telah mengungkapkan kepada Saudara seluruh hal yang kami ketahui tentang ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dampaknya harus dipertimbangkan pada saat menyusun laporan keuangan. (SA 250)
- Kami telah mengungkapkan kepada Saudara identitas pihak-pihak berelasi dengan Perusahaan dan semua hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang kami ketahui. (SA 550)

a

- Kami telah mengkomunikasikan kepada Saudara semua kekurangan dalam pengendalian internal yang manajemen ketahui.
- Kami telah mengungkapkan kepada Saudara:
 - Sejarah Perusahaan masa lalu dalam melaksanakan maksud yang telah dinyatakannya;
 - Alasan Perusahaan untuk memilih tindakan tertentu;
 - Kemampuan Perusahaan untuk mengejar tindakan tertentu;
 - Adanya atau kurangnya informasi lain yang mungkin telah diperoleh selama audit yang mungkin tidak konsisten dengan pertimbangan atau maksud Manajemen.
- Kami telah melakukan verifikasi data dan dokumen. Seluruh data yang diberikan Perusahaan adalah sah dan valid.
- Tidak ada penunjukan auditor lain untuk perikatan audit tahun buku yang sama.

Demikian surat representasi ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bandung, 29 April 2024
PERSEROAN TERBATAS (PT)
JAMKRIDA JABAR



Agus Subrata
Direktur Keuangan